

BAB III

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN PBB

Pada bab ini membahas tentang upaya PBB dalam mengatasi pelanggaran HAM di Myanmar. Selain itu dijelaskan juga kegagalan PBB menghentikan pelanggaran HAM di Myanmar.

A. Upaya PBB Mengatasi Pelanggaran HAM di Myanmar

1. Usaha PBB Mengembangkan dan Meningkatkan Integrasi Standar HAM di Myanmar

Pelanggaran HAM tidak hanya merupakan tragedi individual, tetapi menurut anggota Komnas (Komisi Nasional) HAM, Muladi, dapat pula menciptakan keresahan sosial dan politik. Pada akhirnya, hal-hal ini dapat memicu kekerasan dan konflik di masyarakat dan antara masyarakat dengan negara, sesuai dengan kalimat pertama Piagam PBB yang menyatakan, *'respect for human rights and human dignity is the foundation of freedoms, justice and peace in the world.'*⁴⁷

Pejabat senior PBB tiba di Singapura pada tanggal 9 Juni 2006 berbicara dengan pemerintah setempat tentang situasi di Myanmar. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan integrasi standar HAM di Myanmar. Vijay Nambiar, yang menjabat sebagai *UN Chef de Cabinet* mengunjungi negara-negara Asia dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Sekretaris-Jenderal, Ban Ki-moon untuk

⁴⁷ Muladi: Pelanggaran HAM Dapat Ciptakan Keresahan Sosial Dan Politik," dalam *...*

Myanmar. Nambiar tiba di Singapura dari New Delhi, dan berbicara dengan para pejabat India, bertemu dengan Sekretaris Luar Negeri Nirupama Rao dan Penasihat Keamanan Nasional Shiy Shankar Menon. Nambiar selanjutnya berkunjung ke Beijing pada 11 Juni 2006 untuk berdiskusi lebih lanjut dengan pemerintah Cina. Berkaitan dengan meminta dukungan Cina agar di Myanmar dapat diadakan pemilu yang adil, transparan dan kredibel. PBB mengharapkan semua warga negara Myanmar, termasuk peraih Hadiah Nobel Perdamaian dan pemimpin oposisi terkemuka, Aung Sang Suu Kyi, dapat berpartisipasi dengan bebas.

Pembicaraan tersebut merupakan salah satu upaya PBB untuk meningkatkan integrasi standar HAM di Myanmar. Pemungutan suara yang diadakan pertama kali di Myanmar tersebut merupakan usaha PBB mendesak pemerintah Myanmar untuk menegakkan HAM dengan memajukan demokratisasi.

Penasehat Khusus Sekretaris-Jenderal untuk Myanmar, Ban Ki-moon juga menyatakan keprihatinan atas UU Pemilu yang baru di Myanmar yang tidak memenuhi harapan PBB mengenai persyaratan yang dibutuhkan untuk proses politik yang inklusif. Menurut laporan media, UU yang baru berhubungan dengan registrasi partai politik dan melarang siapapun dengan hukuman kejahatan untuk menjadi anggota sebuah partai resmi.⁴⁸ Adanya pemilu yang demokratis diharapkan mampu membuat pemerintah Myanmar benar-benar merealisasikan peningkatan perhatian

⁴⁸ "Pejabat Tinggi PBB Berkunjung ke Asia untuk Bahas Myanmar," dalam <http://www.unicef.org/press/2006/2006060601.htm>

terhadap HAM di Myanmar. Namun pada kenyataannya masih tetap terjadi banyak pelanggaran di Myanmar. PBB belum mampu menghentikan pelanggaran HAM di Myanmar.

2. PBB Memonitor dan Mendukung Pelaporan Pelanggaran HAM di Myanmar

Badan hak-hak asasi manusia PBB yang paling penting dalam memonitor dan mendukung pelaporan pelanggaran HAM di Myanmar adalah Komisi Hak-Hak Asasi Manusia yang bertemu setiap tahun selama 6 minggu. Rangkaian acara dan terdiri dari 53 pemerintah anggota PBB yang dipilih untuk masa waktu 3 tahun. Komisi ini bertanggungjawab kepada Dewan Ekonomi Sosial dan Budaya. Badan tertinggi PBB adalah Sidang Umum PBB yang bertemu setiap tahun dari bulan September hingga bulan Desember dan memberikan pengesahan final atas setiap usulan dari berbagai badan dalam sistem hak-hak asasi manusia PBB.

Di bawah Komisi Hak-Hak Asasi Manusia terdapat berbagai badan dan mekanisme lainnya. Dari sejumlah badan dan mekanisme tersebut yang paling penting adalah Sub-Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia. Sub-Komisi ini juga disebut badan para ahli yang terdiri dari individu-individu (bukan pemerintah) dan diharapkan berfungsi sebagai *'think tank'* atau kelompok pemikir yang memberi masukan untuk Komisi Hak-Hak Asasi Manusia.

Sub-Komisi ini biasanya bertemu setiap tahun selama tiga minggu pada bulan

Agustus. Sub-Komisi memiliki badan-badan di bawahnya lagi termasuk di antaranya

Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat. Kelompok Kerja ini bertemu satu minggu sebelum rangkaian acara pertemuan Sub-Komisi dimulai. PBB memiliki Sub-Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia. Sub-Komisi adalah badan di atas Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat. Tugas yang diemban oleh badan ini adalah membuat garis-garis besar masalah-masalah hak asasi manusia dan menyediakan kesempatan bagi individu-individu masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam sistem hak-hak asasi manusia PBB.

Dalam menentukan ingin terlibat dalam pertemuan-pertemuan Sub-Komisi, perlu mempertimbangkan antara biaya yang dikeluarkan dan efektifitas yang diperoleh sebab pertemuan Sub-Komisi tersebut diselenggarakan setelah sesi pertemuan Kelompok Kerja. Sub-Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia (biasa disebut dengan "Sub-Komisi" saja) merupakan salah satu bentuk pertemuan besar PBB mengenai hak asasi manusia. Sub-Komisi tersebut merupakan badan yang di atas Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat yang terdiri dari 26 anggota yang berasal dari berbagai belahan dunia. Kedua puluh enam anggota Sub-Komisi tersebut merupakan kumpulan para ahli yang bekerja sesuai kapasitasnya masing-masing. Sub-Komisi bertemu setiap bulan Agustus di Jenewa selama 3 minggu setelah sesi pertemuan Kelompok Kerja berakhir.

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia diberikan mandat oleh resolusi Majelis

Yunani 49/141 menjadi badan resmi PBB dengan tanggung jawab utama untuk

kegiatan hak asasi manusia, yaitu:⁴⁹ (a) untuk mempromosikan dan melindungi semua hak asasi manusia; (b) untuk membuat rekomendasi kepada badan-badan berwenang dalam sistem PBB untuk meningkatkan promosi dan perlindungan semua hak asasi manusia; (c) untuk mempromosikan dan melindungi hak untuk pembangunan; (d) untuk memberikan bantuan teknis untuk kegiatan hak asasi manusia; (e) untuk koordinasi PBB pendidikan hak asasi manusia dan program informasi public; (f) untuk memainkan peran aktif dalam menghilangkan hambatan kepada realisasi hak asasi manusia; (g) untuk memainkan peran aktif dalam mencegah kelanjutan pelanggaran hak asasi manusia; (h) untuk terlibat dalam dialog dengan pemerintah dengan tujuan menghormati dan mengamankan hak asasi manusia; (i) untuk meningkatkan kerjasama internasional; (j) untuk mengkoordinasikan promosi hak asasi manusia dan kegiatan perlindungan di seluruh sistem PBB; (k) untuk merasionalisasi, beradaptasi, memperkuat dan penyederhanaan sistem PBB di bidang hak asasi manusia.

PBB melalui Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia terus memonitor dan mendukung pelaporan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. Namun untuk mengambil tindakan tegas dan meneruskannya kepada Dewan Keamanan PBB hanya merupakan hal yang sia-sia karena Myanmar mendapatkan perlindungan dari China. Contoh nyata PBB berupaya untuk menegakkan HAM di Myanmar adalah dengan berusaha menangani kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi. PBB sebenarnya sudah terus secara konsisten "menekan secara

halus” agar pemerintah Myanmar yaitu Junta Militer bersedia melakukan reformasi politik dengan cara membebaskan seluruh tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi. Sekjen PBB, Ban Ki Moon, berkali-kali mengutus Ibrahim Gambari sebagai Pejabat Utusan Khusus PBB untuk datang menemui Suu Kyi. Bulan Februari 2009, Suu Kyi meminta agar Gambari menyampaikan pesannya agar Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon tidak usah berkunjung ke Myanmar sebelum dirinya bersama tahanan politik yang lain dibebaskan. Jurubicara PBB yang berkedudukan di Myanmar menggambarkan bahwa pertemuan Suu Kyi dan Gambari pada bulan Februari di Wisma Negara di Rangoon tersebut berjalan dengan sangat signifikan dan diakui ada langkah maju. Padahal sempat, di tahun 2008 lalu Aung San Suu Kyi tidak mau bertemu Gambari dengan alasan upaya Gambari selama ini tidak efektif.⁵⁰ Namun pada kenyataannya Myanmar malah memasukkan Suu Kyi ke dalam penjara. Satu-satunya harapan yang memiliki legitimasi dan kekuatan formil untuk menekan Myanmar hanyalah PBB tapi kenyataannya PBB tidak mampu menekan pelanggaran HAM di Myanmar.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi manusiawi. Untuk menegakkan HAM maka PBB pada tahun 1948 mengeluarkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) yang menjelaskan hak-hak asasi fundamental yang

⁵⁰ “Ke Dalam Penjara Aung San Suu Kyi Ternyata Kembali & Jenderal Than Swe Yang Pongah Seakan “Menang”,” dalam <http://redaksikatakami.wordpress.com/2009/05/15/ke-dalam-penjara-aung->

disetujui oleh pemerintah untuk dilindungi. Deklarasi tersebut bertujuan untuk melindungi hidup, kemerdekaan dan keamanan pribadi, menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul secara damai, berserikat, berkepercayaan agama serta kebebasan bergerak, melarang perbudakan, penahanan sewenang-wenang, pemenjaraan tanpa proses peradilan yang jujur dan adil, serta melanggar hak pribadi seseorang. Deklarasi tersebut juga mengandung jaminan terhadap hak-hak ekonomi, social, dan budaya.⁵¹

PBB berusaha untuk memonitor pelanggaran HAM yang ada di Myanmar. Kasus HAM yang terjadi di Myanmar mendapat kecaman dari dunia internasional, bahkan ASEAN dan PBB berusaha memerintahkan Junta Militer untuk segera memberhentikan pelanggaran HAM. PBB berusaha menekan Junta Militer dengan berusaha membuat resolusi. Namun, kenyataan yang terjadi, para penguasa Cina yang memberikan dukungan terhadap Myanmar membuat pemerintah militer itu masih berdiri kuat di Myanmar.

Dunia Barat sudah lama “mengasingkan” Myanmar karena seringnya melakukan pelanggaran HAM. Contoh upaya yang dilakukan untuk menghentikan pelanggaran HAM adalah dengan memberikan tekanan terhadap negara Junta Militer tersebut dengan mengirimkan seorang senator Amerika untuk membujuk para pemimpin militer Burma melepaskan Suu Kyi. Sebagai imbalan atas pembebasan Suu

⁵¹ “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam,” dalam <http://lib.ugm.ac.id/download/9/pendata/wafiqmuati.pdf>, diakses tanggal 5 Oktober 2011

Kyi, Barat menjanjikan pencabutan sanksi dan akan kembali memberi bantuan ekonomi.⁵²

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) awal Oktober 2007, PBB sudah mengutus Ibrahim Gambari menemui pemimpin junta Myanmar Than Shwe untuk mendesak pemimpin junta menghentikan kekerasan terhadap para pemrotes, meminta junta membebaskan para tahanan, melangkah menuju reformasi demokrasi yang nyata, menghargai HAM, dan mengadakan rekonsiliasi nasional dengan oposisi. Namun kenyataannya, junta terus menangkap siapa saja yang dicurigai. Pemberangusan terhadap demonstran, bahkan warga tak bersalah, tetap berlanjut. Bahkan, junta malah menangkap karyawan PBB yang bekerja di Yangon.

3. Resolusi Majelis Umum PBB

Upaya lain dari PBB adalah mengeluarkan Resolusi untuk Myanmar. Setidaknya sejak 2005 ada tiga kali Resolusi Majelis Umum PBB untuk Myanmar. Yang pertama adalah akhir 2005, Resolusi itu disetujui melalui konsensus setelah satu mosi Kuba untuk mencegah pemungutan suara mengenai naskah itu dikalahkan dengan 77 suara menentang, 54 mendukung dan 35 abstain.

⁵² "Ulah Myanmar, Negara Klien Cina," dalam

Disponsori Uni Eropa, resolusi itu menyatakan "keprihatinan yang mendalam atas pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis yang masih berlangsung", termasuk penyiksaan terhadap etnik minoritas, wanita dan anak-anak, pembunuhan tanpa diadili, pemerkosaan, penyiksaan, kerja paksa dan penolakan kebebasan untuk melakukan pertemuan, dsb. Yang kedua adalah akhir tahun 2006, adalah rencana Amerika Serikat (AS) untuk menekan pemerintah Myanmar melalui usulan draf resolusinya kepada DK PBB. dalam sebuah resolusi. Sedangkan yang ketiga yaitu akhir Desember, yang disetujui Kamis 24 Desember 2009. Resolusi ini mengecam pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Myanmar. Resolusi terhadap negara, dulu bernama Burma itu, yang diputuskan melalui pemungutan suara 86 setuju, 23 menentang dan 39 abstain" itu mengecam keras pelanggaran yang sistematis terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan pokok rakyat Myanmar yang masih terus berlangsung." Resolusi itu juga mendesak para penguasa militer Myanmar segera membebaskan pemimpin oposisi dan pemenang hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah, serta lebih dari 2.000 tahanan lainnya. Majelis Umum juga mengecam situasi hak asasi manusia di Korea Utara, Myanmar, Iran mejadi acara tahunan dalam tahun-tahun belakangan ini. Keputusan tahun ini dibuat setelah penyelidikan khusus hak asasi manusia PBB tentang Myanmar Tomas Gjea Quintana mengemukakan kepada sidang Majelis Umum Oktober bahwa "situasi hak asasi manusia di Myanmar tetap mengusarkan."⁵³

Itusan putusan dari sejumlah negara yang melanggar hak asasi manusia juga tidak

memiliki catatan buruk hak asasi manusia, termasuk China, Rusia, Libya, Sudan, Suriah, Mesir dan Zimbabwe, dengan mengatakan negara-negara tersebut umumnya menentang resolusi-resolusi seperti itu karena memiliki kedekatan khusus dengan negara yang sering melakukan pelanggaran HAM.

B. Kegagalan PBB Menghentikan Pelanggaran HAM di Myanmar

PBB pada kenyataannya mengalami kegagalan menghentikan pelanggaran HAM di Myanmar. Bukti nyatanya adalah PBB tidak dapat membela pengacara yang menangani kasus Falun Gong dan menentang Junta Militer di Myanmar. Pengacara hak asasi manusia Cina, Tang Jitian dan Liu Wei, pada 1 Mei 2010 lisensi praktek hukumnya dicabut. Sebuah audiensi publik dari kedua pengacara itu dilaksanakan di Departemen Kehakiman Beijing. Pada Audiensi publik ini melaporkan bahwa lisensi dari kedua pengacara itu dicabut karena membela praktisi Falun Gong. Di saat memberikan argumennya dalam membela praktisi, hakim menghentikan dan memerintahkan untuk meninggalkan pengadilan. Hakim kemudian memerintahkan agar lisensi dari kedua pengacara itu dicabut dan agar keduanya dihukum.⁵⁴ Sedangkan Resolusi yang dikeluarkan oleh PBB ternyata tidak efektif untuk meredam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar. Padahal resolusi itu

⁵⁴ "PBB Mengeluarkan Laporan Tahunan 2010, Penganiayaan Terhadap Pengacara Hak Asasi Manusia di China Mendapat Perhatian," dalam http://www.kebijak.anjernih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2218:pbb-mengeluarkan-laporan-tahunan-2010-penganiayaan-terhadap-pengacara-hak-asasi-manusia-di-china-mendapat-perhatian&catid=35:di-dunia&Itemid=54, diakses tanggal 4 Oktober 2011

disetujui oleh sebagian besar anggota Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, tapi tetap saja pelanggaran HAM terus terjadi.

Yusril Ihza Mahendra, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa PBB mengalami kegagalan dalam menghentikan pelanggaran HAM di Myanmar. Yusril memberikan sederet contoh. PBB dan Amerika Serikat memprotes penguasa militer Myanmar yang menindas kelompok oposisi pimpinan Aung San Suu Kyi, tapi tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika pemerintah Myanmar mengusir ribuan kaum muslimin (suku Rohingya) dari negeri itu.⁵⁵ Hal ini menunjukkan bahwa PBB tidak mampu melakukan tindakan nyata untuk menangani kasus pelanggaran HAM di Myanmar.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PBB mengalami kegagalan dalam menghentikan pelanggaran HAM di Myanmar. Bukti nyatanya adalah PBB tidak mampu mengambil tindakan apapun saat pengacara Cina yang mendukung HAM di Myanmar mendapatkan tekanan dari pemerintah Cina dan juga tidak efektifnya Resolusi yang dibuat oleh PBB. Selain itu, PBB juga tidak mampu berbuat apapun saat pemerintah Myanmar mengusir ribuan kaum muslimin (suku Rohingya) dari Myanmar.

⁵⁵ "Standar Ganda di Hari HAM," dalam